

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kegiatan muamalah yang sebagaimana sering ditemukan di kehidupan sehari-hari adalah akad yang terjadi di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Banjar, yaitu pendistribusian darah perkantong antara pihak PMI Kota Banjar kepada pasien atau pihak yang membutuhkan darah. Tidak terlepas dari hal tersebut, terdapat spekulasi yang bermunculan dikalangan pasien yang awam, mengapa darah harus dibayar sedangkan mendonorkannya pun tidak dipungut biaya sama sekali dengan dasar keikhlasan mendonorkan darah kepada yang membutuhkan. Adapun secara lahiriyah, orang yang memperjualbelikan darah dirasa tidak manusiawi, sebab penggunaan darah itu adalah untuk menolong nyawa penderita. Menurut salah satu staf PMI E H mengatakan, “pihak PMI melakukan pendistribusian darah adalah dalam rangka memfasilitasi orang yang ingin menolong saudara sesama manusia dengan mendonorkan darahnya. Namun sangat disayangkan apabila masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa akad yang terjadi di PMI terkait pendistribusian darah adalah akad jual beli darah.”¹

E H juga menuturkan faktor adanya pandangan negatif terhadap Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Banjar “minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak PMI dan pengetahuan di masyarakat akan kesadaran berdonor darah menjadi

¹Wawancara dengan E H (Staff PMI Kota Banjar), tanggal 22 Mei 2018 di Unit Transfusi Darah Kota Banjar.

hal yang patut dijadikan sorotan utama terkait anggapan bahwa akad pendistribusian darah adalah akad jual beli dan bukan dalam rangka tolong menolong.”² Menurut B K salah satu tokoh pemerintah kota Banjar kelurahan Hegarsari yang merupakan sekretaris lurah mengatakan, “terdapat informasi bahwa masyarakat Kota Banjar belum mendapatkan pemahaman terkait dengan akad pendistribusian darah dari pihak Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Banjar. Harapan pemerintah Kota Banjar terkait dengan hal tersebut, menginginkan pihak Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Banjar dapat mensosialisasikan dan memberikan pendidikan kepada masyarakat secara sistematis dan berkelanjutan.”³

Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan ditemukan bahwa, akad dalam pendistribusian darah adalah akad jual beli darah oleh PMI yang dikemas perkantong, seperti halnya membeli barang/obat kesehatan. Sedangkan dalam syari’at Islam terutama menurut madzhab Syafi’i melarang penjualan darah dengan alasan darah termasuk barang najis yang tidak diperbolehkan mempergunakannya dan mengambilnya untuk memenuhi kebutuhan. Selain itu darah juga termasuk barang yang telah diharamkan secara dzatnya.

Akad antara pihak PMI dan pasien bukanlah akad *tijari* atau sering dikenal dengan jual beli yang bersifat komersial dan mengambil keuntungan, karena biaya yang dikeluarkan untuk satu kantong darah adalah sebagai Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD). Menurut A N yang juga merupakan staf Palang Merah

²Wawancara dengan E H (Staff PMI Kota Banjar), tanggal 22 Mei 2018 di Unit Transfusi Darah Kota Banjar.

³Wawancara dengan B K (Sekretaris Kelurahan Hegarsari Kota Banjar), tanggal 23 Mei 2018 di Kantor Kelurahan Hegarsari Kota Banjar.

Indonesia (PMI) Kota Banjar mengatakan, “biaya Pengganti Pengelolaan Darah (BPPD) adalah regulasi resmi dari PMI pusat dan pemerintah untuk menunjang segala aspek yang berkaitan dengan biaya pengelolaan darah. Biaya yang telah ditetapkan BPPD diuraikan kebeberapa bagian, seperti biaya penunjang, biaya administrasi, pembelian alat habis pakai, biaya pemeriksaan dan lainnya. Dari biaya tersebut kemudian diakumulasikan dalam biaya perkantong darah.”⁴

Biaya Pengganti Pengolahan Darah tersebut jika dikaitkan dengan Hukum Ekonomi Syariah termasuk *ujrah* (upah) maka transaksi yang terjadi di PMI tersebut termasuk kedalam akad *ijarah al-‘amal* (penyewaan). Sedangkan dalam akad sewa menyewa terdapat kewajiban pengembalian atas barang yang disewa setelah masa sewa telah jatuh tempo kepada orang yang menyewakannya dengan memberikan *ujrah* sesuai kesepakatan. Selain itu terdapat pula barang yang habis pakai seperti kantong darah, jarum infus, obat habis pakai, dan lain-lain. Maka hal ini dalam permasalahan akad yang dilakukan PMI dapat dikatakan sebagai akad dengan prinsip *tabarru* dengan pemberian *iwad* (pengganti), yaitu biaya yang diberikan sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan untuk pengolahan darah tersebut.

Berdasarkan kenyataan yang ada bahwa kurangnya sosialisasi oleh pihak PMI menjadi masalah utama terkait akad yang dilaksanakan dalam proses pendistribusian darah. Sedangkan apabila dikaitkan dengan ketentuan syariat Islam transaksi akan sah apabila akad yang dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan

⁴Wawancara dengan A N (Staff PMI Kota Banjar), tanggal 6 Februari 2018 di Unit Transfusi Darah Kota Banjar.

dengan syariat Islam. Namun hal ini sangat bertentangan dengan prinsip akad *tabarru'* yang menjelaskan bahwa akad yang didasarkan kepada tolong menolong. Maka inilah yang menjadi alasan penting dilakukannya penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan bahwa masalah yang dijadikan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana konsep distribusi darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Banjar ?
2. Bagaimana pelaksanaan distribusi darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Banjar ?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap pelaksanaan distribusi darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Banjar ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang terjadi yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan konsep distribusi darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Banjar.
2. Menjelaskan pelaksanaan distribusi darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Banjar.
3. Menjelaskan tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap pelaksanaan distribusi darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Banjar.

Adapun kegunaan dari penelitian ini terbagi menjadi kedalam dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan lebih luas terutama dalam bidang akademik mengenai bidang muamalah, begitu pula memberikan pemahaman yang lebih luas dalam sebuah organisasi sosial kemanusiaan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mengupas pemahaman bagi para penggiat donor darah dan menjadi pertimbangan PMI Kota Banjar maupun organisasi sosial lainnya untuk menjaga kemaslahatan dengan memperhatikan koridor hukum Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berguna sebagai bahan referensi yang relevan dengan penelitian terdahulu dan menghindari adanya plagiasi karya orang lain. Berikut ini merupakan referensi yang berkaitan dengan penelitian ini:

Buku karya Wahbah az-Zuhaili yang berjudul *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*⁵ membahas tentang materi-materi fiqh dari semua madzhab, dengan disertai proses penyimpulan hukum dari sumber-sumber hukum Islam baik dari naqli maupun aqli. Materi fiqh yang dibahas dalam jilid 5 ini diantaranya hukum

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid V*, terjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2010).

transaksi keuangan, transaksi jual beli, asuransi, khiyar, macam-macam akad jual beli, akad ijarah.

Buku yang berjudul *Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan Telaah Fiqh dan Biotika Islam*⁶ oleh penulis Abu Fadl Mohsin Ebrahim berisi tentang ketentuan-ketentuan fiqh kontemporer tentang persoalan kloning, eutanasia, transfusi darah, transplantasi organ, dan eksperimen pada hewan yang tidak diatur dengan tegas dalam nas maupun tradisi fiqh klasik.

Penelitian yang membahas tentang transaksi darah oleh Elok Maslakhah dalam judulnya: “Perspektif Fikih terhadap Transaksi Darah di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo”.⁷ Skripsi ini mengkaji terkait tentang transaksi darah menurut perspektif hukum bisnis Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *library research*, menggunakan teori *ijarah* (sewa menyewa).

Penelitian Ridwan Mawardi yang berjudul “Distribusi dan Mekanisme Penetapan Harga Darah oleh PMI dalam Perspektif Fiqh Muamalah”.⁸ Penelitian ini difokuskan pada analisis mekanisme penetapan harga darah yang dilakukan di PMI Kota Jakarta. Metode yang digunakan adalah metode *field research*,

⁶ Abu Fadl Mohsin Ebrahim, *Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ dan Eksperimen pada Hewan Telaah Fiqh dan Bioetika*, (Jakarta: Serambi, 2001).

⁷ Elok Maslakhah, “Perspektif Fikih terhadap Transaksi Darah di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya Cabang Sidoarjo”, *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syaria’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 2013.

⁸ Ridwan Mawardi, “Distribusi dan Mekanisme Penetapan Harga Darah oleh PMI dalam Perspektif Fiqh Muamalah”, *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2012.

menggunakan pendekatan normatif hukum Islam. Dalam penelitiannya tidak dijelaskan secara rinci akad-akad yang terjadi dalam transaksi di PMI Jakarta, tapi hanya digunakan akad *ijarah*.

Penelitian oleh Rania Dewi Nugraha yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Transaksi Darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Yogyakarta”⁹. Penelitian ini difokuskan pada pelayanan transaksi jual beli darah yang terjadi di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, karena penelitian ini mengkhususkan kajiannya pada aspek hukum ekonomi syariah dan akad yang terjadi pada transaksi darah di PMI Kota Banjar. Penulis mengidentifikasi secara rinci akad *tabarru'* yang terjadi dalam transaksi darah tersebut dan menganalisis dari beberapa aspek kemuamalahannya.

E. Kerangka Pemikiran

Az-Zarqa menyatakan bahwa dalam pandangan syara', suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu, untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut dengan *ijab qabul*. *Ijab* adalah

⁹ Rinia Dewi Nugraha, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Transaksi Darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Yogyakarta”, *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016

pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginannya secara pasti untuk mengikat diri. Sedangkan, qabul adalah pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuannya untuk mengikat diri.¹⁰

Adapun sumber hukum akad adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijtihad (termasuk di dalamnya menggunakan instrumen *ijma'*, *qiyas*, *al-maslahah al-mursalah*, *'urf*, *istishab*, *sad ad-dari'ah*, dan lain-lain yang diakui sebagai instrumen ijtihad). Di samping itu, terdapat *legal maxim* (kaidah fiqhiyah) yang merupakan prinsip umum yang dapat dijadikan panduan umum dalam pembangunan hukum Islam, terutama apabila terdapat masalah baru yang memerlukan keputusan hukum secara cepat.¹¹

1. Al-Qur'an

Allah SWT. menggariskan dalam surah Al-Maidah (5) Ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DIATI
BANDUNG

ٱلصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemah:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”¹²

¹⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta, Gema Insani, 2004), hlm. 39

¹¹ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 96

¹² Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), hlm. 106

2. Hadist

Petunjuk yang sangat gamblang disampaikan Rosululloh SAW. tentang hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang dilarang seperti halnya dalam berakad atau bertransaksi.

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص.م عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Terjemah:

Telah diceritakan kepadaku Zuhair ibn Harbi, telah diceritakan kepada kami Yahya ibn Said dari Ubaydillah diceritakan kepadaku Abu Zinad dari Abu Hurayrah berkata: Rosululloh saw. telah melarang *bai hashah dan bai' gharar*.¹³

3. Kaidah Fihyiah

Para ulama merumuskan kaidah yang berkaitan dengan akad terutama pada bidang muamalah, yaitu:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Terjemah:

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”¹⁴

¹³ Imam Muslim, *As-Shahih Al-Muslim wa Syarh An-Nawawi*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), vol. 9-10, hlm. 156-157

¹⁴ Syarif Hidayatullah, *Qawaid Fiqhiyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer*, (Depok: Gratama Publishing, 2012), hlm 151.

Berbagai dasar hukum tentang akad yang telah dikemukakan dari dalil Al-Qur'an, As-Sunnah hingga Kaidah Fiqhiyah (Legal Maxim) maka terdapat produk fiqh muamalah dari kaidah tersebut berupa ketentuan akad yang terjadi dalam pelaksanaannya seperti akad *tijari* (komersial) dan akad *tabarru'*/tolong-menolong (non komersial). Akad *Tijari* adalah akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah terpenuhi semuanya. Atau dalam redaksi lain akad *tijari* (*compesational contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*.¹⁵ Akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan, karena bersifat komersial. Sedangkan berbeda dengan akad *tijari* yang bersifat komersial, akad *tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.¹⁶ Jumhur ulama mendefinisikan *tabarru'* dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.¹⁷ Firman Allah SWT. dalam surah Al-Maidah (5) Ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ...

¹⁵ DR. Mardani, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 77.

¹⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 35.

¹⁷ Asy Syarbani Al-Khatib, *Mugni Al-Muhtal*, Jilid II, (Beirut: Dar Fikr, 1978), hlm. 296.
Dalam buku Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*,...hlm. 35.

Terjemah:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”¹⁸

Adapun ringkasan dari kerangka pemikiran di atas, dapat dilihat dalam bagan berikut yang meliputi definisi akad, akad menurut Al-Qur'an, akad menurut Hadist, dan kaidah ushul fiqh dari akad:



¹⁸ Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ... hlm. 106

F. Metodologi Penelitian

Secara umum metodologi penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁹ Adapun penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah yang dilihat dari aspek lokasi, metodologi, dan data-data yang didapatkan baik itu data primer maupun data sekunder.

1. Lokasi

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penyusun melakukan penelitian yaitu di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Banjar, Jalan BKR No. 03, Pataruman, Hegarsari, Kota Banjar, Jawa Barat 46323.

2. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan.²⁰

3. Jenis Informasi

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna dimana data-data diperoleh dari lapangan dalam bentuk observasi, buku-buku serta wawancara untuk memperjelas perolehan data yang dibutuhkan. Jenis

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 3

²⁰ Anwar Sanusi, *Metode Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013), hlm.

informasi yang ditentukan dalam penelitian tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelayanan transaksi darah di Palang Merah Indonesia (PMI) kota Banjar, terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu:

- a. Data tentang konsep akad *tabarru'* dalam Hukum Ekonomi Syari'ah.
- b. Data tentang pelaksanaan akad *tabarru'* dalam distribusi darah di Palang Merah Indonesia.
- c. Data tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap distribusi darah di Palang Merah Indonesia.

4. Sumber Informasi

Penentuan sumber informasi didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, pada tahapan ini ditentukan sumber informasi primer dan sekunder, terutama pada penelitian yang bersifat normatif yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan.²¹

Sumber Informasi primer yaitu informasi yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan,²² yaitu dengan wawancara dan pengambilan data langsung pada salah satu pihak yang terkait yaitu bagian yang khusus mengenai masalah pelayanan.

Sumber data skunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder yang berwenang dan berkaitan dengan penelitian,

²¹Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi (Bidang Ilmu Agama Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet II, 2001), hlm. 64.

²²Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 128-129.

data-data yang ada di PMI, buku-buku, jurnal, skripsi dan yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis yang bersifat dokumentasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data pada penulisan ini, penulis akan menggunakan beberapa metode yaitu:

- a. Observasi, ialah pengamatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila telah sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan dapat di kontrol keadaannya (*reliabilitasnya*) dan kesahihannya (*validasinya*).²³

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi *non partisipatif* yaitu pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan yang sedang diteliti atau hanya berperan sebagai pengamat kegiatan. Dalam kegiatan ini, peneliti terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data dan informasi mengenai distribusi darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Banjar.

- b. Wawancara (interview), menurut pengertiannya wawancara (*interview*) adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung (*interviewer* dan *interviewee*)²⁴. Dalam ini wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi

²³Nana Syaodih Sukmadinata, *Jenis-jenis Penelitian*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Cet III, 2007), hlm 54.

²⁴ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*.(Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm 56-58.

langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi arus informasi dalam wawancara, yaitu: pewawancara, responden, pedoman wawancara, dan situasi wawancara.²⁵

- c. Studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data, metode ini penulis peroleh dengan cara menelaah pustaka dari buku-buku pedoman serta tulisan,serta bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang penulis bahas.

6. Analisis Hasil Penelitian

Data yang penulis peroleh sebelum dianalisis terlebih dahulu di olah sesuai dengan jenis data yang ada. Setelah terkumpul dengan jelas sesuai jenis masing-masing, maka penulis menganalisisnya dengan menggunakan data kualitatif. Adapun langkah-langkah yang akan di tempuh oleh penulis dalam rangka menganalisis data dari hasil wawancara serta observasi.

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah ²⁶:

- b. Mengumpulkan informasi dan mengkategorikan sesuai jenis-jenis data.
- c. Melakukan seleksi terhadap informasi yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian.

²⁵Riduan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 74

²⁶ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, hlm.

- d. Menafsirkan informasi yang telah terpilih dengan menggunakan kerangka pemikiran.
- e. Menarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian.

